

Peran Kebudayaan India Pra-Buddha dalam Pembentukan Nilai Sosial Masyarakat Buddhis Awal

Meri ^{1*}, Alfred Wijaya ², Kabri ³, Partono ⁴

¹⁻⁴ Program Studi Ilmu Agama Buddha (S2), STIAB Smaritungga Boyolali, Indonesia

* Penulis Korespondensi: the.meri.setiawan@gmail.com ¹

Abstract. *This study aims to analyze the formative influence of pre-Buddhist Indian culture on the development of social values within early Buddhist society. Prior to the emergence of Buddhism in the 6th century BCE, Indian civilization had already evolved a complex cultural and philosophical landscape characterized by the varṇa (caste) hierarchy, Vedic ritualism, and the metaphysical doctrines of the Upaniṣads concerning karma, saṃsāra, and mokṣa. Employing a qualitative library research method, this study draws on secondary historical and sociological literature as well as primary Buddhist scriptures from the Sutta Pitaka (Pali Text Society edition). The analysis identifies three major cultural elements Brahmanical ritualism, the doctrine of rebirth and moral causation, and the śramaṇa ascetic movements that provided both the context and the dialectical counterpoint to the rise of Buddhism. The findings reveal that the Buddha's teaching emerged as a moral and philosophical critique of the Vedic worldview, rejecting hereditary privilege and ritual exclusivity in favor of ethical conduct (sīla), mental cultivation (bhāvanā), and compassionate social responsibility (mettā-karuṇā). Through this transformation, Buddhism redefined human worth based on moral action (kamma), rather than lineage or social status, thus creating an egalitarian and ethically grounded social order. Understanding the pre-Buddhist cultural background offers deeper insight into the sociological, philosophical, and ethical dimensions of early Buddhist thought and highlights its continuing relevance for contemporary discussions on social justice, equality, and interreligious harmony.*

Keywords: Caste System; Early Buddhism; India; Pre-Buddhist; Social Ethics

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh formatif budaya India pra-Buddha terhadap perkembangan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Buddha awal. Sebelum munculnya agama Buddha pada abad ke-6 SM, peradaban India telah mengembangkan lanskap budaya dan filosofis yang kompleks yang dicirikan oleh hierarki vara (kasta), ritualisme Veda, dan doktrin metafisik Upaniads. Dengan menggunakan metode penelitian perpustakaan kualitatif, penelitian ini mengacu pada literatur sejarah dan sosiologis sekunder serta kitab suci Buddha primer dari Sutta Pitaka (edisi Masyarakat Teks Pali). Analisis tersebut mengidentifikasi tiga elemen budaya utama ritualisme brahmanis, doktrin kelahiran kembali dan sebab-akibat moral, dan gerakan pertapaan śramaṇa. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa ajaran Buddha muncul sebagai kritik moral dan filosofis terhadap pandangan dunia Veda, menolak hak istimewa turun-temurun dan eksklusivitas ritual demi perilaku etis (sīla). Melalui transformasi ini, Buddhisme mendefinisikan kembali nilai manusia berdasarkan tindakan moral (kamma), bukan garis keturunan atau status sosial, sehingga menciptakan tatanan sosial yang egaliter dan berlandaskan etika. Memahami latar belakang budaya pra-Buddha menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang dimensi sosiologis, filosofis, dan etis dari pemikiran Buddhis awal dan menyoroti relevansinya yang berkelanjutan untuk diskusi kontemporer tentang keadilan sosial, kesetaraan, dan keharmonisan antaragama.

Kata kunci: Sistem Kasta; Buddhisme Awal; India; Pra-Buddha; Etika Sosial

1. LATAR BELAKANG

India kuno merupakan salah satu pusat peradaban tertua yang berperan besar dalam membentuk arah perkembangan pemikiran religius, filosofis, dan sosial umat manusia. Di wilayah ini lahir sejumlah sistem kepercayaan dan filsafat besar dunia, seperti Hinduisme, Jainisme, dan Buddhisme, yang hingga kini masih memberikan pengaruh mendalam terhadap kebudayaan dan pandangan hidup masyarakat global (Basham, 1954; Bronkhorst, 2007).

Sebelum abad ke-6 SM, masyarakat India telah memiliki struktur sosial yang kompleks, sistem ritual keagamaan yang mapan, serta tradisi intelektual yang berkembang melalui teks-teks Veda dan filsafat Upaniṣad (Thapar, 2002; Doniger, 2010).

Sistem sosial masyarakat India pra-Buddha dibangun di atas konsep *varna* (kelas sosial), yang bersifat hierarkis dan religius. Empat golongan utama Brahmana (kaum pendeta), Ksatria (penguasa dan prajurit), Waisya (pedagang dan petani), serta Sudra (pekerja dan pelayan) diposisikan secara berjenjang dalam struktur masyarakat (Smith, 1994; Sharma, 1990). Di luar keempat varna tersebut terdapat kelompok *Chandala* atau *Dalit*, yang dianggap “tidak tersentuh” dan ditempatkan di luar sistem sosial formal. Struktur sosial yang rigid ini tidak hanya menimbulkan ketimpangan ekonomi, tetapi juga melegitimasi perbedaan status moral dan spiritual berdasarkan kelahiran (Olivelle, 2004; Ambedkar, 2014).

Kehidupan masyarakat India pra-Buddha didominasi oleh ritualisme Veda yang dipimpin oleh kaum Brahmana. Keberhasilan spiritual pada masa itu diyakini hanya dapat dicapai melalui pelaksanaan upacara kurban (*yajña*) yang benar dan sah secara liturgis. Otoritas kaum Brahmana terhadap teks suci dan praktik ritual menjadikan sistem keagamaan Veda bersifat eksklusif, di mana akses terhadap pengetahuan spiritual dibatasi bagi kasta tertentu (Flood, 1996; Gombrich, 2006). Di sisi lain, muncul pula tradisi filsafat *Upaniṣad* yang mencoba menafsirkan ulang makna religiusitas melalui introspeksi dan pencarian hakikat diri (*ātman*) serta prinsip absolut (*Brahman*).

Konteks sosial dan religius yang tertutup ini memunculkan reaksi intelektual dari kelompok *śramaṇa*, yakni para pertapa non-Veda yang menolak otoritas Brahmana dan berusaha menemukan jalan pembebasan melalui disiplin batin, meditasi, dan etika moral. Gerakan *śramaṇa* inilah yang kemudian melahirkan aliran-aliran spiritual baru, termasuk Jainisme dan Buddhisme, yang menolak dogmatisme ritual dan mengedepankan pengalaman langsung dalam praktik spiritual (Bronkhorst, 2007; Samuel, 2008).

Ajaran Buddha muncul pada abad ke-6 SM dapat dipahami sebagai respons kritis terhadap tatanan sosial-religius India pra-Buddha. Buddha tidak hanya menolak superioritas kelahiran, tetapi juga membalik paradigma spiritual masyarakat saat itu dari ritual eksternal menuju pembebasan batin. Buddha secara eksplisit menolak legitimasi kasta dengan menyatakan bahwa kebajikan moral, bukan kelahiran, yang menentukan kemuliaan seseorang (*Dīgha Nikāya* III.80–97; PTS D iii 80). Kelahiran seseorang tidak menentukan statusnya sebagai Brahmana, melainkan karena perbuatannya (DN III.93).

Pernyataan ini menunjukkan pergeseran nilai fundamental dari sistem sosial berbasis keturunan menuju sistem etika berbasis tindakan (*kamma*). Ajaran ini menjadi dasar bagi

terbentuknya nilai sosial Buddhis awal yang egaliter, rasional, dan berorientasi pada tanggung jawab pribadi.

Kajian terhadap kebudayaan India pra-Buddha menjadi sangat penting, bukan hanya untuk memahami latar historis lahirnya Buddhisme, tetapi juga untuk menyingkap dinamika dialektis antara tradisi lama dan visi moral baru yang dihadirkan oleh Sang Buddha. Melalui analisis historis, tekstual, dan sosiologis, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana warisan sosial, keagamaan, dan filosofis India pra-Buddha membentuk serta memengaruhi nilai-nilai sosial masyarakat Buddhis awal yang menekankan kesetaraan, kebajikan, dan pembebasan spiritual universal.

2. KAJIAN TEORITIS

Penelitian tentang pengaruh kebudayaan India pra-Buddha terhadap pembentukan nilai sosial Buddhisme awal membutuhkan kerangka teoritis multi-dimensional yang menghubungkan teori-teori sosiologi agama, teori stratifikasi sosial, dan teori perubahan agama. Kajian teoritis ini membantu menafsirkan bagaimana struktur sosial, praktik ritual, dan wacana filosofis pra-Buddha membentuk respon normatif dan etis dalam ajaran Buddha.

Teori Stratifikasi Sosial dan Caste (Louis Dumont & tradisi sosiologi komparatif)

Pemahaman tentang sistem *varna* dan kasta sering dirujuk pada tradisi analitik yang menekankan dimensi hierarkis dan nilai-nilai kosmologis yang menegaskan pembedaan sosial berdasarkan kelahiran (Dumont, 1980) layak dimasukkan sebagai rujukan teoritis utama dalam kajian kasta). Kerangka ini relevan untuk menjelaskan mekanisme internalisasi status sosial, legitimasi religius, serta pembatasan akses terhadap modal simbolik (mis. pengetahuan Veda). Dalam konteks India pra-Buddha, teori stratifikasi membantu menempatkan posisi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra serta marginalisasi Dalit dalam jaringan nilai sosial yang menjadikan kelahiran sebagai penentu status.

Teori Legitimasi Otoritas & Agama (Max Weber)

Weber menekankan tiga jenis kekuasaan/otoritas (tradisional, karismatik, legal-rasional) dan bagaimana agama dapat berfungsi sebagai alat legitimasi sosial-politik (Weber, 1922/1978). Konsep ini berguna untuk menganalisis bagaimana Brahmana menggunakan otoritas ritual dan kontrol liturgis untuk melegitimasi tatanan sosial, sementara gerakan *śramaṇa* dan figur Buddha berperan sebagai agen perubahan yang menggerus legitimasi tradisional melalui wacana etika berbasis *kammavāda* (tindakan).

Teori Fungsionalisme dan Peran Agama dalam Kohesi Sosial (Émile Durkheim)

Durkheim melihat agama sebagai sistem praktik yang memperkuat solidaritas dan norma kolektif (Durkheim, 1912). Pendekatan ini membantu menelaah peran ritual Veda dan praktik agama dalam memproduksi kohesi sosial berbasis hierarki, serta bagaimana transformasi ritual ke arah *dāna* dan praktik etis Buddhis merekonfigurasi fungsi sosial agama dari pemelihara hierarki menjadi sarana pembentukan solidaritas egaliter dalam komunitas Sangha.

1) Teori Habitus dan Modal Simbolik (Pierre Bourdieu)

Bourdieu (1986) memberikan alat analisis untuk memahami internalisasi praktik budaya (habitus) dan bagaimana modal simbolik (mis. penguasaan ritual, bahasa suci) mereproduksi hierarki sosial. Konsep ini berguna untuk menjelaskan bagaimana akses terhadap literasi religius (Sanskerta, Veda) memberi Brahmana posisi dominan dan bagaimana pemilihan bahasa prakrit/Pāli oleh komunitas Buddhis awal berfungsi sebagai strategi inklusif yang merombak distribusi modal simbolik.

2) Teori Perubahan Agama dan Reformasi Religius

Kajian mengenai reforma agama (reform movement) menekankan faktor-faktor sosial, ekonomi, dan ideational yang mendorong munculnya new religious movements (Stark & Bainbridge, 1985; McGuire, 2008). Dalam konteks India pra-Buddha, gerakan śramaṇa dan tindak kritik terhadap ritualisme Veda dianggap sebagai bentuk reformasi yang menanggapi kondisi sosial-ekonomi dan krisis legitimasi ritual.

3) Kerangka Teologis-Tekstual: Hermeneutika Teks Sutta

Analisis kajian tekstual terhadap Sutta Pitaka (PTS edition) digunakan sebagai sumber primer untuk menafsirkan bagaimana doktrin Buddhisme. ajaran tentang *anattā*, *kamma*, dan Jalan Tengah dibentuk sebagai respons terhadap problematika sosial-religius masa itu. Pendekatan hermeneutis kontekstual digunakan untuk mengaitkan isi teks dengan struktur sosial pra-Buddha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data primer diperoleh dari Sutta Pitaka (terutama *Dīgha Nikāya*, *Majjhima Nikāya*, dan *Saṃyutta Nikāya* berdasarkan edisi Pali Text Society), sedangkan data sekunder berasal dari karya akademik tentang sejarah India dan Buddhisme (Basham, 1954; Bronkhorst, 2007; Gombrich, 2006).

Analisis dilakukan melalui pendekatan hermeneutika kontekstual, yaitu menafsirkan teks Buddhis dalam konteks kebudayaan India pra-Buddha guna memahami relasi antara perubahan sosial dan pembentukan nilai moral Buddhis awal.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dengan fokus pada sumber-sumber pustaka yang membahas India pra-Buddha dan teks primer Buddhis dari *Sutta Pitaka* (edisi *Pali Text Society*).

Sumber utama data terdiri atas: 1)Teks-teks primer Buddhis: *Dīgha Nikāya*, *Majjhima Nikāya*, *Saṃyutta Nikāya*, *Aṅguttara Nikāya* (PTS edition). 2)Literatur sekunder: karya-karya akademik mengenai sejarah sosial India kuno (Thapar, 2002; Basham, 1954), struktur kasta (Smith, 1994; Sharma, 1990), serta analisis sosio-filosofis Buddhisme (Gombrich, 2006; Bronkhorst, 2007). 3)Sumber komparatif: hasil penelitian kontemporer tentang transformasi sosial-religius dalam periode *Mahājanapada* (Samuel, 2008; Harvey, 2013). 4)Data dianalisis menggunakan analisis tematik (*thematic content analysis*) yang mengelompokkan informasi ke dalam kategori-kategori utama: (a) struktur sosial dan kasta, (b) sistem religius dan ritual Veda, (c) praktik pertapaan (*śramaṇa*), (d) dinamika politik-ekonomi, (e) transformasi nilai sosial Buddhis awal.

Struktur Sosial Masyarakat India Pra-Buddha

Struktur sosial masyarakat India Pra-Buddha dibangun atas dasar sistem *varna* (warna/kelas), yang bersifat hierarkis dan sakral. Empat golongan utama tersebut adalah Brahmana (kaum pendeta), Ksatria (prajurit dan penguasa), Waisya (pedagang dan petani), serta Sudra (pekerja rendahan). Di luar sistem tersebut terdapat kelompok Dalit atau kaum “tak tersentuh,” yang mengalami diskriminasi sosial dan dipandang berada di luar tatanan masyarakat (Thapar, 2002; Doniger, 2010).

1) Brahmana

Brahmana menempati posisi tertinggi dalam hierarki sosial. Mereka berperan sebagai pemimpin ritual, penjaga kitab suci Veda, serta penghubung antara manusia dengan para dewa. Keberadaan Brahmana memperlihatkan dominasi religius dalam kehidupan sosial-politik India kuno, karena otoritas spiritual mereka dijadikan legitimasi bagi sistem politik dan ekonomi (Flood, 1996; Jamison & Witzel, 1992).

2) Ksatria

Golongan Ksatria menempati posisi kedua, dengan fungsi utama sebagai pelindung masyarakat, prajurit, serta penguasa kerajaan. Kekuatan politik berada di tangan mereka, tetapi legitimasi kekuasaan tetap bergantung pada restu Brahmana. Hubungan simbiotik antara Ksatria dan Brahmana menjadi salah satu ciri khas masyarakat India kuno (Kulke & Rothermund, 2004; Basham, 1954).

3) Waisya

Waisya terdiri atas pedagang, petani, dan pengrajin yang menopang kegiatan ekonomi masyarakat. Mereka memiliki status lebih rendah dari Brahmana dan Ksatria, tetapi berperan penting dalam perkembangan perdagangan lintas wilayah yang kelak juga mendukung penyebaran agama Buddha. Peranan Waisya dalam pertumbuhan ekonomi India kuno menegaskan adanya hubungan erat antara kasta dan peran fungsional dalam masyarakat (Jha, 2004; Sharma, 1990).

4) Sudra

Sudra merupakan golongan pekerja kasar yang melayani kasta-kasta di atasnya. Mereka tidak memiliki hak untuk mempelajari kitab suci Veda dan sering kali diposisikan sebagai kelas subordinat. Keterbatasan hak sosial ini menunjukkan ketidaksetaraan struktural dalam masyarakat India kuno (Olivelle, 2004; Smith, 1994).

5) Dalit (Kaum Tak Tersentuh)

Di luar sistem *varna* terdapat kelompok Dalit atau "*Chandala*," yang dipandang hina. Mereka dianggap tidak layak berinteraksi sosial dengan kelompok kasta lain dan sering ditempatkan di wilayah terpisah. Diskriminasi terhadap Dalit menggambarkan stratifikasi sosial ekstrem yang menimbulkan ketidakadilan. Kritik terhadap perlakuan diskriminatif ini kemudian menjadi salah satu alasan munculnya ajaran Buddha, yang menolak penilaian berdasarkan kasta dan menekankan kesetaraan spiritual semua makhluk (Gombrich, 2006; Ambedkar, 2014).

Kepercayaan dan Agama di India Kuno

Sebelum kemunculan ajaran Buddha, kehidupan keagamaan masyarakat India didominasi oleh tradisi Veda, yang berkembang sejak sekitar 1500 SM. Tradisi ini berakar pada kedatangan bangsa Indo-Arya ke kawasan India Utara dan meninggalkan warisan berupa Veda, kumpulan kitab suci yang menjadi fondasi utama agama Hindu kuno. Sistem keagamaan India pra-Buddha ditandai oleh politeisme, ritual kurban, dominasi kaum Brahmana, serta berkembangnya konsep-konsep metafisis seperti karma, samsara, dan moksha (Flood, 1996; Thapar, 2002).

1) Kitab Suci Veda dan Otoritas Brahmana

Kitab Rigveda, sebagai kitab Veda tertua, memuat himne-himne pujian kepada para dewa, yang mencerminkan pandangan religius masyarakat awal. Di dalamnya, posisi dewa-dewa alam seperti Indra (dewa hujan dan perang), Agni (dewa api), dan Varuna (penjaga hukum kosmik) sangat sentral. Ritual yajna (kurban) dilaksanakan dengan penuh ketelitian oleh kaum Brahmana, yang berfungsi sebagai perantara antara manusia dengan dewa.

Kedudukan Brahmana sangat dominan dalam struktur sosial, karena mereka dianggap memiliki otoritas atas pengetahuan sakral. Monopoli mereka terhadap ritual menjadikan agama Veda identik dengan ritualisme, di mana keselamatan dan keberkahan diyakini dapat diperoleh melalui pelaksanaan upacara yang tepat (Jamison & Witzel, 1992; Doniger, 2010).

2) Politeisme dan Pemahaman Kosmologis

Kepercayaan pada banyak dewa mencerminkan upaya masyarakat India kuno dalam menjelaskan fenomena alam. Para dewa dipersonifikasikan berdasarkan fungsi kosmologis: Indra sebagai penguasa hujan dan kemenangan, Agni sebagai perantara kurban, Surya sebagai dewa matahari, dan Soma yang terkait dengan ritual minuman suci. Keanekaragaman dewa ini menunjukkan karakter politeistik dan sinkretis, di mana fungsi keagamaan selalu terkait dengan kepentingan praktis kehidupan sehari-hari, seperti kesuburan, peperangan, dan kelangsungan hidup (Basham, 1954; Michaels, 2004).

Namun, seiring waktu berkembang pula kecenderungan menuju monisme dengan munculnya konsep Brahman, prinsip absolut yang melampaui dewa-dewa individual. Konsep ini kelak menjadi landasan filsafat Upanisad dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pemikiran Buddha, yang mengkritisi gagasan keabadian jiwa (*ātman*) dan menawarkan alternatif berupa *anattā* (ketiadaan diri) (Olivelle, 1996; Harvey, 2013).

3) Konsep Karma, Samsara, dan Moksha

Salah satu sumbangan terbesar agama India kuno adalah pengembangan gagasan karma (hukum sebab akibat), samsara (siklus kelahiran kembali), dan moksha (pembebasan dari samsara). Doktrin ini mengajarkan bahwa tindakan moral seseorang berpengaruh terhadap kelahiran di masa depan. Dengan demikian, kelahiran, penderitaan, dan status sosial bukanlah sesuatu yang kebetulan, melainkan konsekuensi dari perbuatan di kehidupan sebelumnya (Sharma, 1990; Witzel, 1997).

Pemahaman ini memberikan landasan bagi pencarian spiritual yang lebih dalam, khususnya dalam tradisi Upanisad (sekitar 800–500 SM), yang menekankan introspeksi dan filsafat ketuhanan. Pemikiran Upanisad ini memengaruhi Buddha muda, meskipun kemudian

beliau menolak absolutisme Brahman dan Atman, serta merumuskan jalan tengah yang lebih pragmatis untuk mencapai kebebasan dari penderitaan (Gombrich, 2006; Bronkhorst, 2007).

4) Praktik Pertapaan dan Meditasi

Selain ritual Brahmanis, berkembang pula tradisi śramaṇa (pertapaan), yaitu kelompok-kelompok asketis yang menolak otoritas Veda dan mengembangkan metode meditasi serta tapa sebagai sarana pembebasan. Kelompok ini mencakup para pengembara, pertapa, dan guru spiritual non-Veda, termasuk para cikal bakal Jainisme dan Buddhisme. Praktik tapa (penyiksaan diri) dan meditasi mendalam menjadi bagian penting dari eksplorasi keagamaan yang akhirnya diadopsi, tetapi dimodifikasi oleh Buddha (Bronkhorst, 2007; Dundas, 2002).

5) Kritik Sosial terhadap Agama Veda

Sistem keagamaan Veda yang dikuasai Brahmana sering dianggap eksklusif, karena ritual hanya dapat dilakukan oleh kasta tertentu. Hal ini menimbulkan kritik dari kaum śramaṇa yang menolak absolutisme Brahmana. Kritik terhadap ritualisme, diskriminasi kasta, dan monopoli otoritas spiritual oleh Brahmana, menjadi pemicu lahirnya alternatif religius, termasuk Buddhisme, yang menekankan universalitas Dharma bagi semua kalangan tanpa memandang status sosial (Ambedkar, 2014; Samuel, 2008).

Kepercayaan dan agama di India kuno ditandai dengan dominasi tradisi Veda, ritual *yajna* yang dipimpin Brahmana, politeisme yang perlahan berkembang menjadi monisme, serta doktrin metafisis mengenai karma, samsara, dan moksha. Tradisi śramaṇa menghadirkan alternatif spiritual melalui pertapaan dan meditasi, sekaligus sebagai bentuk kritik terhadap ritualisme Brahmana. Latar belakang keagamaan yang kompleks ini menjadi landasan filosofis dan sosiologis bagi lahirnya ajaran Buddha, yang memodifikasi sekaligus mengkritisi tradisi India kuno.

Kebiasaan dan Gaya Hidup Penduduk

Kehidupan sehari-hari masyarakat India pra-Buddha sangat dipengaruhi oleh struktur sosial dan kepercayaan religius mereka. Gaya hidup berpusat pada komunitas desa, aktivitas pertanian, serta keterikatan dengan adat istiadat dan norma yang diatur oleh sistem kasta. Selain itu, tradisi seni, bahasa, dan filsafat berkembang pesat, sehingga membentuk fondasi kebudayaan India klasik.

1) Kehidupan Agraris dan Ekonomi Desa

Sebagian besar masyarakat India kuno hidup di desa-desa agraris (*grama*). Pertanian menjadi mata pencaharian utama, dengan padi, gandum, dan jelai sebagai hasil utama. Sistem irigasi sederhana telah dikenal, sementara peternakan sapi, kambing, dan kerbau menopang kebutuhan pangan serta kegiatan ritual. Desa berfungsi sebagai unit sosial-ekonomi yang

mandiri, dengan tata kelola berbasis adat dan dipengaruhi oleh *varna* (Kulke & Rothermund, 2004; Thapar, 2002).

Perdagangan juga berkembang pesat, baik lokal maupun lintas wilayah. India dikenal sebagai penghasil kapas, rempah, dan logam, yang menjadi komoditas penting dalam jalur perdagangan Asia kuno. Keterlibatan kaum Waisya dalam perdagangan ini menunjukkan keterkaitan erat antara ekonomi dan stratifikasi sosial (Jha, 2004; Sharma, 1990).

2) Struktur Keluarga dan Tradisi Sosial

Masyarakat India pra-Buddha menganut sistem keluarga patriarkis, di mana ayah memegang otoritas tertinggi. Perkawinan dianggap sebagai ikatan religius dan sosial, bukan sekadar kontrak pribadi, melainkan sarana menjaga kemurnian kasta. Perempuan memiliki peran penting dalam rumah tangga, meskipun akses mereka terhadap pendidikan dan ritual terbatas.

Upacara keagamaan, siklus hidup (kelahiran, perkawinan, kematian), dan perayaan musiman menjadi bagian integral dari gaya hidup. Ritual ini tidak hanya memperkuat identitas religius, tetapi juga memperkuat struktur sosial yang ada (Olivelle, 2004; Smith, 1994).

3) Seni, Sastra, dan Bahasa

Seni dan sastra India pra-Buddha menunjukkan perkembangan signifikan. Musik dan tari digunakan dalam konteks ritual dan hiburan, sementara sastra Sanskerta menjadi media ekspresi keagamaan dan intelektual. Kitab Veda, selain berfungsi religius, juga mengandung puisi yang menunjukkan nilai estetis tinggi.

Bahasa Sanskerta menempati kedudukan sebagai bahasa suci dan ilmiah, sedangkan bahasa rakyat (*prakrit*) digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan bahasa Pali dan prakrit kemudian menjadi kunci penting dalam penyebaran ajaran Buddha (Witzel, 1997; Doniger, 2010).

4) Gaya Hidup Religius dan Spiritualitas

Selain kehidupan sosial yang diatur adat, gaya hidup masyarakat pra-Buddha sangat dipengaruhi oleh pencarian religius. Ritual kurban, doa, serta meditasi pertapaan menjadi praktik umum. Kaum *śramaṇa* (pertapa pengembara) mengadopsi gaya hidup asketis, menolak kenyamanan material, dan mencari pembebasan melalui tapa serta meditasi.

Tradisi asketis ini memperlihatkan adanya keragaman gaya hidup: dari masyarakat umum yang hidup agraris hingga kaum spiritualis yang hidup dalam pengembaraan. Pola ini memperkaya keragaman sosial India kuno dan memberikan ruang bagi lahirnya Buddhisme, yang mengambil jalan tengah antara hedonisme dan asketisme ekstrem (Bronkhorst, 2007; Harvey, 2013).

Kebiasaan dan gaya hidup masyarakat India pra-Buddha ditandai oleh corak agraris, sistem keluarga patriarkis, keterikatan pada ritual keagamaan, serta berkembangnya seni, bahasa, dan sastra. Pola kehidupan ini bukan hanya mencerminkan keberlanjutan budaya, tetapi juga membuka ruang lahirnya gerakan spiritual baru seperti Buddhisme, yang mengkritisi keterikatan material dan diskriminasi sosial, sekaligus menyerap tradisi meditasi serta nilai universalitas spiritual.

5) Sistem Politik dan Ekonomi

Sistem politik dan ekonomi India pra-Buddha menunjukkan dinamika yang kompleks. Pada abad ke-6 SM, wilayah India Utara terbagi menjadi beberapa negara-kota besar (*mahājanapada*) dengan sistem pemerintahan yang beragam, sementara perekonomian ditopang oleh pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Struktur politik dan ekonomi ini turut membentuk konteks sosial yang memengaruhi kemunculan serta penyebaran ajaran Buddha.

6) Mahājanapada dan Sistem Politik

India pra-Buddha terdiri atas enam belas *mahājanapada* (kerajaan besar), di antaranya *Magadha*, *Kosala*, *Vajji*, dan *Vatsa*. Bentuk pemerintahan sebagian besar adalah monarki, dipimpin oleh raja (*rājan*) yang memiliki kekuasaan militer dan administratif. Namun, terdapat pula bentuk republik (*gaṇa-saṅgha*), seperti yang ditemukan di *Vajji* dan *Malla*, di mana keputusan politik diambil melalui majelis oligarki (Thapar, 2002; Kulke & Rothermund, 2004).

Peran raja tidak hanya bersifat politik, tetapi juga religius. Kekuasaan mereka dilegitimasi oleh kaum Brahmana melalui upacara penobatan dan ritual kurban. Simbiosis antara kekuasaan politik (Ksatria) dan otoritas religius (Brahmana) menjadi karakteristik khas India kuno (Michaels, 2004; Basham, 1954).

7) Ekonomi Agraris dan Perdagangan

Perekonomian India pra-Buddha terutama berbasis pada pertanian. Tanaman utama meliputi padi, gandum, jelai, kapas, dan tebu. Sistem irigasi berkembang pesat di wilayah Gangga, menjadikan pertanian lebih produktif. Hasil pertanian tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi komoditas penting dalam perdagangan antarwilayah (Jha, 2004; Sharma, 1990).

Selain pertanian, perdagangan memainkan peranan vital. India dikenal sebagai penghasil kapas, rempah-rempah, dan logam, yang diperdagangkan hingga Asia Tengah dan Timur Tengah. Perdagangan dilakukan melalui jalur darat (awal dari Jalur Sutra) maupun sungai Gangga yang strategis. Kelompok Waisya menjadi motor ekonomi, dan keberadaan mereka sebagai patron komunitas Buddhis mempercepat penyebaran agama Buddha (Gombrich, 2006; Bronkhorst, 2007).

8) Kota-Kota dan Urbanisasi

Munculnya pusat urbanisasi menjadi salah satu ciri khas India pra-Buddha. Kota-kota seperti *Rājagaha* (Magadha), *Śrāvastī* (Kosala), dan *Vārāṇasī* berkembang sebagai pusat politik, ekonomi, dan budaya. Kota menyediakan pasar, pusat administrasi, serta menjadi tempat bertemunya berbagai kelompok sosial. Urbanisasi ini menciptakan masyarakat yang lebih terbuka dan plural, sehingga menjadi lahan subur bagi lahirnya gerakan spiritual baru seperti Buddhisme (Thapar, 2002; Harvey, 2013).

9) Pajak, Tenaga Kerja, dan Sistem Redistribusi

Dalam sistem monarki, rakyat diwajibkan membayar pajak pertanian kepada raja. Pajak ini digunakan untuk menopang militer, pembangunan infrastruktur, serta upacara keagamaan. Raja juga berhak atas sebagian hasil panen rakyat sebagai simbol kekuasaan. Di samping itu, tenaga kerja dari kasta rendah sering dimobilisasi untuk proyek-proyek publik, seperti pembangunan jalan, istana, dan irigasi (Sharma, 1990; Olivelle, 2004).

Sistem redistribusi kekayaan ini mencerminkan stratifikasi sosial yang kaku, tetapi sekaligus menunjukkan adanya mekanisme ekonomi terpusat yang menopang stabilitas kerajaan. Buddhisme, dengan penekanan pada dana (pemberian sukarela), hadir sebagai kritik dan alternatif terhadap sistem pajak dan redistribusi yang bersifat koersif (Samuel, 2008; Gombrich, 2006).

Sistem politik India pra-Buddha ditandai oleh keberadaan mahājanapada dengan model monarki maupun republik, di mana legitimasi kekuasaan bersandar pada otoritas religius Brahmana. Ekonomi berbasis pertanian dan perdagangan berkembang pesat, didukung oleh urbanisasi yang melahirkan kota-kota besar. Pajak dan tenaga kerja menjadi instrumen kekuasaan raja dalam mengelola masyarakat. Dinamika politik dan ekonomi ini menciptakan kondisi sosial yang kondusif bagi lahirnya Buddhisme, yang menawarkan nilai kesetaraan, kebebasan spiritual, dan kritik terhadap dominasi elit politik-religius.

Warisan Budaya yang Mempengaruhi Ajaran Buddha

Ajaran Buddha tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan muncul dari interaksi kritis terhadap warisan budaya dan religius India pra-Buddha. Sejumlah elemen kebudayaan, baik yang berasal dari tradisi Veda maupun dari kelompok asketis non-Veda, memberikan kontribusi penting dalam pembentukan doktrin dan praktik Buddhisme. Dengan demikian, Buddhisme dapat dipahami sebagai transformasi kreatif dari warisan India kuno, yang mengadaptasi unsur-unsur lama sekaligus mengkritisinya.

1) Konsep Karma dan Samsara

Salah satu warisan terbesar adalah doktrin karma (hukum sebab akibat moral) dan samsara (siklus kelahiran kembali). Kedua konsep ini sudah berkembang dalam agama Veda dan diperdalam dalam filsafat Upaniṣad. Dalam tradisi Hindu, karma dipandang sebagai hukum yang mengikat jiwa (*ātman*) dalam siklus samsara hingga tercapai moksha (pembebasan) (Olivelle, 1996; Witzel, 1997).

Buddhisme mengadopsi gagasan tersebut tetapi dengan reinterpretasi radikal: Buddha menolak konsep jiwa abadi (*ātman*) dan menggantinya dengan doktrin non-diri (*anattā*). Pembebasan (*nirvāṇa*) dalam Buddhisme bukanlah penyatuan dengan Brahman, melainkan lenyapnya hasrat, kebodohan, dan keterikatan yang menjadi akar penderitaan (Harvey, 2013; Gombrich, 2006).

2) Tradisi Pertapaan (*Śramaṇa*)

Tradisi *śramaṇa*, yaitu kelompok pertapa non-Veda seperti Jain, *Ajīvika*, dan kelompok asketis lain, memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan Buddhisme. Kaum *śramaṇa* menolak ritual kurban Brahmana dan lebih menekankan tapa, disiplin diri, serta meditasi sebagai jalan menuju kebebasan.

Siddhartha Gautama sendiri sebelum mencapai pencerahan berguru kepada dua pertapa *śramaṇa*, *Ālāra Kālāma* dan *Uddaka Rāmaputta*. Praktik tapa ekstrem yang beliau jalani kemudian ditinggalkan, sehingga lahirah ajaran Jalan Tengah (*Majjhimā Paṭipadā*), yang menghindari hedonisme maupun asketisme berlebihan (Bronkhorst, 2007; Dundas, 2002).

3) Bahasa dan Tradisi Literasi

Warisan budaya India pra-Buddha juga tampak dalam penggunaan bahasa. Sanskerta sebagai bahasa liturgis dan ilmiah berfungsi dalam konteks ritual Veda, sementara bahasa rakyat seperti Prakrit dan Pali berkembang di kalangan masyarakat luas. Buddhisme memanfaatkan bahasa Prakrit (khususnya Pali) untuk menyebarkan ajarannya agar lebih mudah dipahami masyarakat, berbeda dari Hindu ortodoks yang membatasi pengetahuan Veda pada Brahmana (Witzel, 1997; Doniger, 2010).

Pemilihan bahasa rakyat ini menunjukkan strategi inklusif Buddha yang menekankan universalitas Dharma, sekaligus mencerminkan pengaruh tradisi literasi India kuno.

4) Kritik terhadap Sistem Kasta

Buddhisme juga merupakan respons terhadap stratifikasi sosial India kuno yang kaku. Dalam agama Veda, status sosial ditentukan oleh kelahiran, sementara akses terhadap ritual dan pengetahuan suci hanya diperuntukkan bagi kasta tertentu. Buddha menolak diskriminasi

ini dengan menegaskan bahwa kebajikan spiritual tidak ditentukan oleh kelahiran, melainkan oleh karma dan praktik etika individu (Ambedkar, 2014; Thapar, 2002).

Dengan demikian, Buddhisme menghadirkan visi kesetaraan spiritual, di mana semua makhluk memiliki potensi mencapai pencerahan. Pandangan ini menjadi salah satu faktor utama yang menarik kaum Waisya (pedagang) dan Sudra (pekerja) untuk menjadi pendukung awal komunitas Sangha.

5) Warisan Ritual dan Transformasi Etis

Meskipun mengkritisi ritual Veda, Buddhisme tetap mempertahankan aspek tertentu dalam bentuk transformasi etis. Misalnya, praktik *dāna* (pemberian) menggantikan ritual kurban hewan dengan bentuk yang lebih etis dan non-kekerasan. Prinsip *ahiṃsā* (tanpa kekerasan), yang juga berkembang dalam tradisi Jain, diintegrasikan ke dalam etika Buddhis sebagai ajaran universal tentang welas asih (*karuṇā*) (Michaels, 2004; Samuel, 2008).

Dengan cara ini, Buddhisme mengadopsi sekaligus mengubah warisan budaya India kuno, sehingga lahir sistem ajaran baru yang lebih egaliter, etis, dan praktis. Warisan budaya India pra-Buddha memberikan fondasi intelektual, spiritual, dan sosial bagi lahirnya Buddhisme. Konsep karma dan samsara, tradisi śramaṇa, bahasa Sanskerta dan Prakrit, kritik terhadap sistem kasta, serta transformasi ritual menjadi etika, semuanya berperan dalam membentuk karakter Buddhisme sebagai agama sekaligus gerakan sosial. Dengan demikian, Buddhisme dapat dipahami sebagai hasil dialektika kreatif antara warisan India kuno dengan visi baru Siddhartha Gautama tentang pembebasan universal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kebudayaan India Pra-Buddha membentuk fondasi yang kuat bagi lahirnya ajaran Buddha. Struktur sosial berbasis kasta, kepercayaan religius Veda, kebiasaan hidup agraris, sistem politik kerajaan-keajaan kecil, serta aktivitas ekonomi yang berkembang pesat menjadi latar sosial-historis lahirnya Buddhisme.

Ajaran Buddha hadir sebagai respon kritis terhadap sistem sosial yang diskriminatif serta sebagai alternatif spiritual bagi masyarakat yang mencari jalan pembebasan di luar ritualisme Brahmana. Dengan demikian, studi mengenai kebudayaan India Pra-Buddha tidak hanya membantu memahami konteks sejarah, tetapi juga memperkaya kajian perbandingan agama dan filsafat dunia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebudayaan India pra-Buddha memberikan warisan struktural dan intelektual yang signifikan, namun ajaran Buddha hadir sebagai transformasi moral atas sistem tersebut. Melalui reinterpretasi sosial, etis, dan spiritual,

Buddhisme menegaskan tatanan nilai baru yang menekankan kesetaraan, tanggung jawab moral, dan pembebasan universal.

DAFTAR REFERENSI

- Aṅguttara Nikāya* (AN). (1888–1899). *The numerical discourses of the Buddha* (E. M. Hare & F. L. Woodward, Trans.). London: Pali Text Society.
- Ambedkar, B. R. (2014). *Annihilation of caste*. Verso Books.
- Basham, A. L. (1954). *The wonder that was India*. Sidgwick & Jackson.
- Buddhaghosa. (1925). *Sumangalavilasini* [Commentary on the Dīgha Nikāya]. London: Pali Text Society.
- Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. In J. Richardson (Ed.), *Handbook of theory and research for the sociology of education* (pp. 241–258). Greenwood Press.
- Bronkhorst, J. (2007). *Greater Magadha: Studies in the culture of early India*. Brill.
- Dīgha Nikāya* (DN). (1889–1910). *Dialogues of the Buddha* (T. W. Rhys Davids & C. A. F. Rhys Davids, Trans.). London: Pali Text Society.
- Doniger, W. (2010). *The Hindus: An alternative history*. Penguin Books.
- Dumont, L. (1980). *Homo hierarchicus: The caste system and its implications* (2nd ed.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Durkheim, É. (1912/1995). *The elementary forms of religious life*. (K. E. Fields, Trans.). Free Press.
- Flood, G. (1996). *An introduction to Hinduism*. Cambridge University Press.
- Gombrich, R. (2006). *Theravāda Buddhism: A social history from ancient Benares to modern Colombo*. Routledge.
- Harvey, P. (2013). *An introduction to Buddhism: Teachings, history and practices* (2nd ed.). Cambridge University Press.
- Jamison, S. W., & Witzel, M. (1992). *Vedic Hinduism*. Harvard University Press.
- Jha, D. N. (2004). *Early India: A concise history*. Manohar Publishers.
- Kulke, H., & Rothermund, D. (2004). *A history of India*. Routledge.
- Majjhima Nikāya* (MN). (1888–1899). *Middle-length sayings of the Buddha* (I. B. Horner, Trans.). London: Pali Text Society.
- McGuire, M. B. (2008). *Lived religion: Faith and practice in everyday life*. New York, NY: Oxford University Press.

- Michaels, A. (2004). *Hinduism: Past and present*. Princeton University Press.
- Olivelle, P. (1996). *Upaniṣads*. Oxford University Press.
- Olivelle, P. (2004). *The law codes of ancient India*. Oxford University Press.
- Samuel, G. (2008). *The origins of yoga and tantra: Indic religions to the thirteenth century*. Cambridge University Press.
- Samyutta Nikāya* (SN). (1890–1904). *The connected discourses of the Buddha* (C. A. F. Rhys Davids & F. L. Woodward, Trans.). London: Pali Text Society.
- Sharma, R. S. (1990). *Śūdras in ancient India: A social history of the lower order down to circa A.D. 600*. Motilal Banarsidass.
- Smith, B. K. (1994). *Classifying the universe: The ancient Indian varna system and the origins of caste*. Oxford University Press.
- Stark, R., & Bainbridge, W. S. (1985). *The future of religion: Secularization, revival and cult formation*. University of California Press.
- Thapar, R. (2002). *Early India: From the origins to AD 1300*. University of California Press.
- Weber, M. (1978). *Economy and society: An outline of interpretive sociology* (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Original work published 1922)
- Witzel, M. (1997). The development of the Vedic canon and its schools: The social and political milieu. In M. Witzel (Ed.), *Inside the texts, beyond the texts* (pp. 257–345). Harvard Oriental Series.